

ABSTRACT

Linda Herawati Tax Arrears Red Plate = Effect Of Government Bureaucracy Complexity. Under the guidance of Rahmat Zuhdi, SE., MSA., Ak., QIA., CA And Muhammad Syam Kusufi, SE., MSc.,.

This study aims to determine the cause of non-payment of vehicle tax offices in Bangkalan. So that the problems that exist on the red plate vehicle tax arrears can be solved. The method used is qualitative descriptive approach with the technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. Results of this study was the difference in document between UPTD and BPKAD. 50% of vehicles that do not appear in BPKAD could have been deleted and moved into the hands of others, the acquisition of different document sources that can make the difference in the number of units and BPKAD UPTD different. During this UPTD and BPKAD rarely coordinating and synchronizing data so that the red plate vehicles in UPTD unit and BPKAD be different. Tax bill are not up to the holder of the vehicle due to the distribution of which is not good and difficult to charge vehicles that were in the hands of the village head to make a list of arrears accumulating pile. Tax arrears at any time until the official vehicles will meet in UPTD list if there is never a harmonious relationship between the two agencies.

Keywords: Arrears, vehicle tax offices, coordination

ABSTRAK

Linda Herawati Tunggakan Pajak Plat Merah = Efek Dari Rumitnya Birokrasi Pemerintahan. Dibawah bimbingan **Rahmat Zuhdi, SE., MSA., Ak., QIA., dan Muhammad Syam Kusufi, SE.,MSc.,CA** .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Bangkalan. Sehingga permasalahan yang ada tentang tunggakan pajak kendaraan plat merah dapat dipecahkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan data antara UPTD dan BPKAD. Sebesar 50% kendaraan yang tidak nampak di BPKAD bisa jadi sudah di hapus dan pindah ke tangan orang lain, sumber perolehan data yang berbeda yang dapat menjadikan perbedaan jumlah unit di UPTD dan BPKAD berbeda. Selama ini UPTD dan BPKAD jarang melakukan kordinasi dan sinkronisasi data kendaraan plat merah sehingga unit di UPTD dan BPKAD menjadi berbeda pula. Surat Tagihan yang tidak sampai kepada pemegang kendaraan akibat pendistribusian yang tidak baik dan sulitnya menagih kendaraan yang berada di tangan kepala desa membuat daftar tumpukan tunggakan semakin menumpuk. Sampai kapanpun tunggakan pajak kendaraan dinas akan memenuhi daftar di UPTD jika tidak pernah ada hubungan yang harmonis antara kedua instansi tersebut.

Kata Kunci : Tunggakan pajak, Pajak Kendaraan dinas, kordinasi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran.....	xvi

BAB I Putaran Awal Roda Penelitian

1.1 Pengantar	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kontribusi Penelitian.....	12

BAB II Metodologi Sebaai Petunjuk Arah Perjalanan Penelitian

2.1 Pengantar	14
2.2 Jenis Penelitian	14
2.3 Lokasi Penelitian	15
2.3.1 UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jatim	16
2.3.2 BPKAD Kabupaten Bangkalan	17
2.4 Sumber Data	18
2.5 Teknik Pengumpulan data.....	18

2.6 Kriteria Informan	21
2.6.1 Pertemuan dengan Informan 1	22
2.6.2 Pertemuan dengan Informan 2	26
2.6.3 Pertemuan dengan Informan 3	26
2.6.4 Pertemuan dengan Informan Pendukung	28
2.7 Teknik Analisis Data	28
2.8 Keabsahan Data	30

BAB III “Pisau Analisis Penelitian”

3.1 Pengantar	31
3.2 Tugas dan Fungsi UPTD Provinsi	31
3.2.1 Tugas Seksi Pendataan dan Penetapan	32
3.2.2 Tugas Seksi Pembayaran dan Penagihan	32
3.3 Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor	33
3.4 Tinjauan tentang Barang Milik Daerah	34
3.5 Objek pajak dan subjek pajak kendaraan bermotor	34
3.6 Penelitian Terdahulu	35
3.7 Kerangka Pemikiran	36

BAB IV MENGENAL PEMBAYARAN PAJAK “Plat Merah”

4.1 Pengantar	38
4.2 Alur Pembayaran PKB Plat Hitam dan Plat Merah	38
4.3 Pembayaran Pajak “Plat merah” Dishubkominfo dan Dinkes Bangkalan	41

BAB V Disharmonisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (UPTD Bangkalan) dan BPKAD

5.1 Pengantar	44
5.2 Perbedaan Catatan Aset dan Jumlah Wajib Pajak	44

5.3 Sumber Data di UPTD dan di BPKAD yang Berbeda	49
---	----

5.4 kordinasi UPTD dan BPKAD.....	54
-----------------------------------	----

BAB VI KEKACAUAN SURAT TAGIHAN

6.1 Pengantar.....	59
--------------------	----

6.2 Surat Tagihan yang tidak terdistribusikan	59
---	----

6.3 Kendala Penagihan pada Kendaraan Kepala Desa.....	67
---	----

6.4 Perlakuan Tunggakan Pajak Plat Merah di Kabupaten Bangkalan	68
--	----

BAB VII Putaran Akhir Roda Penelitian

6.1 Simpulan	74
--------------------	----

6.2 Keterbatasan Penelitian.....	76
----------------------------------	----

6.3 Saran.....	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Jenisnya di tahun 2012-2013
- Tabel 1.2 : Beberapa Data Tunggakan Plat Merah Kabupaten Bangkalan s.d Maret 2016
- Tabel 2.1 : Deskripsi Para Informan
- Tabel 3.1 : Penelitian Terdahulu
- Tabel 5.1 : Total kendaraan plat merah UPTD vs BPKAD
- Tabel 5.2 : Disharmonisasi UPTD dan BPKAD
- Tabel 6.1 : Rincian Jumlah Tunggakan Plat merah Bangkalan
- Tabel 6.2 : Kekacauan Surat Tagihan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- Gambar 3.1 : Komponen-Komponen Analisis Data
- Gambar 3.2 : Kerangka berfikir
- Gambar 4.1 : Alur pembayaran PKB
- Gambar 4.2 : Surat kuasa Dishub Kominfo Bangkalan
- Gambar 5.1 : STNK plat merah milik informan
- Gambar 6.1 : Surat Tagihan yang tidak terdistribusikan

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Transkrip Wawancara dengan informan
- LAMPIRAN 2 : Dokumentasi
- LAMPIRAN 3 : Beberapa Catatan Kerdaraan Bermotor Plat Merah Versi
BPKAD Kabupaten Bangkalan
- LAMPIRAN 4 : Beberapa Catatan Kendaraan Bermotor Plat Merah Versi
UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Bangkalan